

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 01 NO. 01 | 2024

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V1I1.2627](https://doi.org/10.36859/jp.v1i1.2627)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 21 Agustus 2024 Accepted : 17 Oktober 2024 Published : 17 Oktober 2024

PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DESA WISATA ALAMENDAH KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG

Raysa Agustin¹⁾, Arlan Siddha²⁾, Bayu Septiansyah³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah di Desa Wisata Alamendah Kecamatan Ranca Bali Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa. Dari dimensi Regulator pemerintah daerah melakukan pemolahan dalam menjalankan suatu kebijakan atau program dalam menjaga kestabilan dari perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Dimensi Dinamisator terkait dengan sosialisasi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Desa Wisata Alamendah sudah baik, namun ada beberapa hal yang menyebabkan tidak optimalnya peran dar pemerintah daerah yaitu sosialisasi, belum optimal kinerja dari Desa Wisata diantaranya petugas *Customer service* belum dapat pulih. Dimensi Fasilitator kurangnya efektif dengan baik dari sarana prasarana yang belum terpenuhi seperti halnya *homestay*, keterbatasan pemenuhan masyarakat yang mendukung UMKM di Desa Wisata Alamendah, dan masih banyak program yang bekerjasama denga pihak swasta dan akademisi yang masih dalam pengembangan.

Kata Kunci: Peran Dinas, Pendapatan Asli Daerah, Desa Wisata Alamendah

Abstract

The research aims to describe and analyze how the Role of the Tourism and Culture Office in Developing the Potential of Regional Original Income in Alamendah Tourism Village, Ranca Bali District, Bandung Regency. The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through: observation, interviews, and documentation. The results showed that. From the Regulator dimension, the local government conducts processing in carrying out a policy or program in maintaining the stability of the economy and the welfare of the community. The Dinamisator dimension related to socialization and resources owned by Alamendah Tourism Village is good, but there are several things that cause the role of local government is not optimal, namely socialization, not optimal performance of the Tourism Village including Customer service officers have not been able to recover. The Facilitator dimension is not effective well from the unmet facilities and infrastructure such as homestays, limited fulfillment of communities that support MSMEs in Alamendah Tourism Village, and there are still many programs in collaboration with the private sector and academics that are still under development.

Keywords: *Role of the Agency, Local Revenue, Alamendah Tourism Village*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai salah satu negara yang berdasarkan atas asas hukum yang berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Pengembangan pariwisata di Indonesia memainkan peranan penting dalam hal sumbangannya devisa bagi negara. Dalam hal ini sejalan dengan Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 tahun 2009 telah mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan kegiatan pariwisata di wilayahnya masing-masing secara komprehensif, bagi Pemerintah Daerah dengan prinsip otonomi ini dapat bersaing secara kompetitif mengembangkan potensi daerahnya guna terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata dalam BAB III pasal (4) bahwasanya “Pengembangan Desa Wisata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan

intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan wisata serta mengonservasi potensi wisata desa yang meliputi adat, sosial budaya dan lingkungan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa". Dalam hal ini pengembangan desa wisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan isi pernyataan dari kebijakan pemerintah tentang pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata di atas dapat digambarkan dalam Tabel 1.1 berupa data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung
2020-2023

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2020	Rp.355.000.000.000	Rp. 259.046.500	
2	2021	Rp.1.001.000.000.000	Rp. 1.095.000.000.000	
3	2022	Rp. 1.248.000.000.000	Rp 1.237.000.000.000	
4	2023	Rp. 1.308.000.000.000	Rp.1.327.000.000.00 0	

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung

Berdasarkan pada tabel di atas dari tahun 2020-2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan yang dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan dalam pendapatan asli daerah yang disebakan oleh dampak dari pandemi mengakibatkan aktivitas masyarakat menjadi terganggu terutama kunjungan wisatawan terganggu baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah terbukti pada tahun 2021-2023 mengalami kenaikan pesat. Salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan asli tersebut salah satunya yaitu sektor pariwisata.

Desa Wisata dapat dilihat dari segi penduduk yang masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa

wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata, salah satu Wilayah yang memiliki potensi wisata yang cukup besar salah satunya adalah Desa Wisata Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Ada beberapa potensi alam desa wisata alamendah yang dijadikan pariwisata berdasarkan data proposal pengajuan desa wisata alamaendah Kecamatan Rancabali diantaranya; Kawah putih, Ranca upas, Arboretum (Curug Awi Langit), Patuha Pinus Land, Punceling Pass, Curug Pajajaran, Ciwidey Valley, Emte Highland, Cigadog Lestasi, Patuha Bike Park dll. Pada masa awal berdiri pada tahun 2011, Desa Wisata Alamendah (Dawala) belum memiliki produk dan paket wisata yang dapat ditawarkan pada calon wisatawan.

Desa Alamendah ditetapkan sebagai Desa Wisata melalui Keputusan Bupati Bandung Nomor 556.42/Kep.71-Disbudpar/2011 diubah menjadi Keputusan Bupati Bandung Nomor 556/Kep.770-Disubdpar/2022 tentang Penetapan Desa Wisata di Wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini berkaitan dengan Desa wisata memiliki empat klasifikasi, mulai dari rintisan, berkembang, maju, dan mandiri dengan indikator berupa jumlah kunjungan, industri pariwisata yang berkembang, kesiapan keterampilan dan sumber daya manusia (SDM), diverifikasi produk dan aktivitas wisata, serta amenitas pariwisata. Oleh karena itu, perlu adanya peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung serta partisipasi masyarakat dalam membangun potensi wisata yang dimiliki desanya sehingga pengetahuan dan keahlian dalam kepariwisataan khususnya di wilayah Desa Alamendah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) memiliki tugas yaitu meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata Daerah

Kabupaten Kota dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggotanya.

Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Kelompok Sadar Wisata belum maksimal dalam mengembangkan potensi Desa Wisata Alamendah Kabupaten Bandung yang disebabkan oleh beberapa permasalahan yang ada, seperti masih kurangnya mengenai sosialisasi terkait pengetahuan dan pengelolaan potensi Desa Wisata Alamendah diantaranya masih kurangnya sosialisasi terkait kebijakan Perda Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan desa wisata, minim peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan kapasitas sumberdata manusia, dan terbatas kebutuhan sarana dan prasana. Dari hal tersebut peneliti menggunakan Teori Rasyid (2007:11) terkait peran pemerintah yaitu peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator sebagai pisau penelitian bagi peneliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui jenis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian utama dalam penelitian ini adalah wawancara, foto, dokumen, rekaman dan alat bantu atau perangkat peneliti untuk mengumpulkan data. Unit analisis dalam penelitian ini adalah instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata semua pihak yang terlibat dalam mengembangkan Teknik pengumpulan data bagi peneliti ialah studi pustaka berupa referensi teori buku, jurnal, skripsi. Sedangkan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan mengambil keputusan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melestarikan

dan mengembangkan pariwisata daerah dengan seiring berjalannya waktu dan mengingat dengan adanya arus globalisasi dan modernisasi yang sangat ketat. Dalam hal ini dalam pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisatan dan Kebudayaan dalam pengembangan potensi PAD Desa Wisata Alamendah di Kabupaten Rancabali ini untuk meningkatkan kehidupan perkeonomian, meningkatkan daya tarik wisatawan dan membantu masyarakat dalam pemasaran. Dalam mengatasi yang berkaitan dengan perekonomian dan pemasaran yang merasa terhambat di lingkungan masyarakat, Kepala desa dengan Dinas Priwisata dan Kebudayaan ini perlu terus menerus untuk mengawasi, mengontrol dan melakukan bimbingan ketat untuk meminimalisir kelemahan dalam rangka membuat peluan dan membuat trobosan yang nyata.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Alamendah terjadi adanya permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya secara keseluruhan dari peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengelola pengembangan potensi pendapatan asli daerah di Desa Wisata Alendah ini antara harapan yang dicita-citakan dengan isi regulasi yang didalamnya.

Dengan hal ini yaitu Dinas Priwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung yang memiliki peran untuk melaksanakan peran tersebut serta golongan yang mengembangkan Desa Wisata Alamendah Kecamatana Rancabali, oleh karena itu untuk mendalami penelitian ini peneliti menggunakan teori Rasyid mengemukakan bahwa peran terdiri dari 3 dimensi yang mempengaruhi peran yaitu pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisator dan peran pemerintah sebagai fasilitator.

1. Peran Dinas Priwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Desa Wisata Alamendah Kecamatan Rancabali sebagai Regulator.

Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya. Hal ini berkaitan dengan Desa wisata memiliki empat klasifikasi, mulai dari rintisan, berkembang, maju, dan mandiri dengan indikator berupa jumlah kunjungan, industri pariwisata yang berkembang, kesiapan keterampilan dan sumber daya manusia (SDM), diverifikasi produk dan aktivitas wisata, serta amenitas pariwisata. Tupoksi pada dinas hanya melakukan pengembangan pada sumber daya, pemberdayaan pada masyarakat itu sendiri serta pelatihan untuk masyarakat sekitar agar dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. adanya hubungan kerjasama antar dinas untuk melakkan peningkatan pad di desa wisata alamendah, dapat kita lihat bahwa desa wisata alamendah ini memiliki banyak potensi alam, budaya seta sejarah yang terus dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga dinas - dinas parawisata tentu saja memiliki kerjasama dalam meningkatkan pendapat asli daerah.

Sebagai dinas parawisata tentunya akan melakukan dan mengembangkan program seperti meningkatkan sarana dan prasarana, serta pengembangan kebudayaan, pengembangan pemasaran parawisata, pengembangan kelembagaan pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif untuk desa parawisata alamendah ini. Hal tersebut dapat, peningkatan PAD pada daerah itu sendiri.

2. Peran Dinas Priwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Desa Wisata Alamendah Kecamatan Rancabali sebagai Dinamisator
 - a. Sosialisasi. Sosialisasi mengenai pengembangan Desa Wisata Alamendah ini sepenuhnya sudah megetahui, tetapi

di beberapa daerah di Kecamatan Rancabali maupun di Kabupaten Bandung belum mengetahui mengenai Desa Wisata yang berada di Kecamatan Rancabali tersebut. Walaupun sebelumnya dari Divisi pemasaran Ekonomi dna Kreatif sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan beberapa sektor swasta dan beberapa sekolah di Kabupaten Bandung, dan dari pihak Desa Wisata ini mengirim sponsor kepada beberapa sektor dan sekolah untuk lebih mengenai tentang kegiatan Desa Wisata ini. Kepala Bidang Pengembangan Dinasti dan sumberdaya memang tidak melakukan pemberdayaan terhadap PAD di desa wisata alamendah itu sendiri, bisa dilihat dari fasilitas kerjasama akademisi yang diberikan hanya untuk pengambangan dan penggalian potensi masyarakat ataupun desa wisata alamendah itu sendiri. Sumber daya sumberdaya dari Pihak Desa Wisata telah melakukan kerjasama dengan PT. Biorifa/georifa untuk pengembangan desawisata dan menambahkan program yaitu dengan adanya penyediaan panas bumi yang bekerjasama dengan PT serta adanya koordinasi dengan perguruan tinggi. Namun yang disayangkan dalam pengembangan Desa Wisata Alamendah ini dalam pengadaan reservasi bagi pengunjung atau tamu pada situs web resminya tidak di pulihkan karena dari anggota Pordakwis belum memulihkan dan mengambil alih kepada media sosial seperti instagram dan whatsapp guna melakukan reservasi. sumberdaya yang digunakan di Desa Wisata ini masih belum optimal, dilihat dari pengadaan tourguard yang masih minimnya public speaking dengan wisatawan asing, selain itu untuk website resminya belum dipulihkan oleh anggota Pokdarwis yang memegang website tersebut.

3. Peran Dinas Priwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan

Potensi Pendapatan Asli Daerah Desa Wisata Alamendah Kecamatan Rancabali sebagai Fasilitator.

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Untuk desa wisata ini khususnya pada pengelola membawa tamu untuk berkunjung dan dapat bergabung dengan masyarakat dalam melakukan aktivitas pada umumnya seperti halnya pemerahan susu sapi, memandikan sapi, bertani, dan pengambilan foto itu menjadikan salah satu kegiatan yang desa wisata sediakan untuk wisatawan. Namun, fasilitas yang di berikan, baik dari pemerintah daerah maupun dari Desa Wisata itu sendiri belum terpenuhi dengan layak, Homestay belum tercukupi dari segi fasilitasnya untuk digunakan oleh wisatawan nantinya masih banyak fasilitas yang diterapkan oleh desa wisata ini belum tercukupi dan belum sepenuhnya layak untuk dijadikan tempat wisata karena fasilitas yang berikan dari homestay dan fasilitas hanyak beberapa saja dibandingkan dengan fasilitas lainnya. Selain itu faktor penghambat dalam peningkatan pendapatan dana asli daerah ini berupa fasilitas homestay yang kurang memadai, sehingga membuat pengunjung yang sangat banyak mencari homestay atau penginapan yang cukup jauh dari desa wisata alamendah, kurangnya pemanfaatan lahan oleh masyarakat setempat dan tidak adanya peran dinas dalam memfasilitasi desa wisata alamendah, dan kurangnya efektif dengan baik dari sarana dan prasarana yang belum terpenuhi seperti halnya keterbatasan pemenuhan masyarakat yang mendukung UMKM di Desa Wisata Alamendah, serta banyak program yang bekerjasama dengan pihak swasta dan akademisi.

KESIMPULAN

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melestarikan

dan mengembangkan pariwisata daerah dengan seiring berjalannya waktu dan mengingat dengan adanya arus globalisasi dan modernisasi yang sangat ketat. Dalam hal ini dalam pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan potensi PAD Desa Wisata Alamendah di Kabupaten Rancabali ini untuk meningkatkan kehidupan perkeonomian, meningkatkan daya tarik wisatawan dan membantu masyarakat dalam pemasaran. Dari pembahasan diatas masih banyak belum berjalannya dengan optimal dengan peran pemirntah daerah terkait dengan potensi Pendapatan Asli Daerah Desa Wisata Alamendah Kecamatan Rancabali diantaranya Dimensi Regulator itu sendiri pemerintah daerah melakukan pemolahan dalam menjalankan suatu kebijakan atau program dalam menjaga kestabilan dari perekonomian maupun kesejhteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan bahwasannya memang program tersebut tidak terjalankan sepanjang tahun yang sudah direncanakan pada tahun 2018 hingga 2025 mendatang dengan adanya penanggung jawab dan pendukung guna mempelancar proses kegiatan program berlangsung. Dimensi Dinamisator terkait dengan sosialisasi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Desa Wisata Alamendah sudah baik, namun ada beberapa hal yang menyebabkan tidak optimalnya peran dari pemerintah daerah yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah, diantaranya dengan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Bandung sumber daya yang di dapatkan, tetapi masih belum optimal kinerja dari Desa Wisata diantaranya petugas yang menjadi call center atau Customer service belum membenahi serta hambatannya dari tourguard yang keterbatasan bahasa jika adanya wisatawan asing yang mengunjungi Desa Wisata Alamendah. Dimensi Fasilitator kurangnya efektif dengan baik dari sarana dan prasarana yang belum terpenuhi seperti halnya homestay, keterbatasan

pemenuhan masyarakat yang mendukung UMKM di Desa Wisata Alamendah, dan masih banyak program yang bekerjasama dengan pihak swasta dan akademisi yang masih dalam pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Penerbit Putaka Pelajar.
- Mulyati, T., & Rohmatiah, A. (2022). *Membangun Desa Wisata (Sinergi Antara Potensi dan Pemberdayaan)*. Klaten: Lakeisha.
- Nain, U. (2019). Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Christina, D., Amna, S., & Adha, A. D. (2022). Pelatihan Literasi Bahasa Inggris Pokdarwis Bukit Matoa Dalam Persiapan Menjadi Kampung Wisata. *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(2), 267–280.
<http://ejurnal.ikippgrbojonegoro.ac.id/index.php/J-ABDIPAMAS>
- Irnawati, E. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang- Undang No 6 Tahun 2014 (sebuah kajian tentang otonomi desa). *Inovasi Penelitian*, 635-642.
- Junaidy, R. K., Suwitri, S., & Kismartini. (2019). Manajemen Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah Di Desa Wisata Okura Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Majalah Ilmiah Biak*, 12-22.
- Nurhajati, N. (2019). Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, 1-13.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Data Badan Pendapatan Aseli Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Data

Kunjungan Wisatawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023.

